

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## LRT Jabodetabek Terancam Molor

**JAKARTA**-Megaprojek angkutan cepat dengan kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) tampaknya bakal molor. Fase I target penyelesaian Mei 2019. INDOPOS yang mengikuti media tour LRT Jabodebek melihat langsung banyak titik proyek yang masih berjalan pengerjaannya. Seperti pada titik pengerjaan di terminal LRT Cawang, tampak baru sekitar 40 persen pengerjaan. Begitu juga di Stasiun LRT Taman Mini, baru sekitar 50 persen pengerjaannya ■

Direktur Operasional II Adhi Karya Pundjung Setya Brata yang memimpin media tour mengakui masih ada hambatan di beberapa titik. Namun dia menegaskan, progress pembangunan proyek LRT Jabodebek fase I hingga Januari 2019 telah mencapai 56,1 persen. Pembangunan proyek ini sudah dimulai sejak September 2015. "Progressnya secara keseluruhan 56,1 persen," ujar Pundjung, Senin (14/1).

Pundjung menjelaskan, pembangunan LRT Jabodebek fase I membentang dari Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang kemudian Cawang-Dukuh Atas. LRT Jabodebek sendiri tercatat sepanjang 44,3 kilometer. "Progressnya Cawang-Cibubur 76,21 persen, Cawang-Kuningan-Dukuh Atas 44,19 persen dan Cawang-Bekasi Timur 51,06 persen," kata Pundjung.

Pundjung mengakui ada sejumlah hambatan yang dihadapi dalam pembangunan proyek ini. Salah satunya terkait pembebasan lahan. "Jadi ada dua masalah kritical. Pertama pembebasan tanah di Bekasi Timur, kedua penetapan trase di Dukuh Atas yang sudah ada titik terang setelah ada ratas di Istana," ucap dia. Proyek itu mempunyai nilai pekerjaan sebesar Rp 22,8 triliun.

Sebelumnya, Wakil Presiden

Jusuf Kalla angkat bicara soal LRT Jabodebek yang dianggap terlalu mahal. Terkait ini, Pundjung menampik. Menurutnya, biaya LRT Jabodebek yang digarap oleh perusahaan konstruksi pelat merah itu masih bersaing. Itu jika dibandingkan dengan proyek serupa di negara lain, maupun LRT dan MRT Jakarta. "Kalau bicara per km Rp 500 miliar, dibandingkan dengan MRT dan sebagainya, apalagi dibandingkan di Singapura, harga kita cukup kompetitif," kata dia.

Pundjung menjelaskan, dalam melihat biaya Rp 500 miliar tersebut harus secara menyeluruh. Biaya tersebut tidak hanya yang dikeluarkan untuk pembangunan jalur LRT, tapi meliputi teknologi yang digunakan. "Dalam menerima informasi cost (biaya) harus paham dulu skop pekerjaannya apa, teknologi yang dipakai apa," sebutnya.

Selain itu, dalam nominal biaya Rp 500 miliar per km juga meliputi biaya penyediaan stasiun dan pembangunan depo LRT. Depo ini digunakan untuk menyimpan kereta, tempat perbaikan, dan perawatan. "Jadi cost tadi sudah mengandung cost untuk depo, biayanya nggak murah itu. Cost itu termasuk depo dan stasiun," ujarnya. "Cost memang selalu jadi isu. Kita ingat pembangunan MRT 2012 ada jejak digital sempat ada perdebatan. Saya hanya ingin ingatkan isu seperti ini masih sering terjadi sehingga perlu penjelasan yang jelas dalam melihat cost," tambahnya.

Seperti diberitakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) komentar soal pembangunan LRT Jabodebek. JK menilai pembangunan ini tidak efisien. Moda

transportasi itu dibangun untuk menghubungkan Jakarta dan kota-kota satelit melalui rel melayang (elevated). "Jangan asal bangun saja," ujar JK di hadapan para konsultan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (11/1).

Menurut JK, inefisiensi pertama bisa dilihat dari keputusan pembangunan rel secara melayang. Padahal, harga tanah yang tidak terlalu mahal di perbatasan Jakarta dan wilayah-wilayah di luar Jakarta bisa membuat pembangunan rel reguler dilakukan dengan lebih murah. "Kalau di luar kota, lahan masih murah. Masa, penduduk tidak ada, kenapa mesti (dibangun) elevated di luar kota?" ujar JK.

Inefisiensi kedua adalah pembangunan rel tepat di samping jalan tol Jakarta-Cikampek. JK menyampaikan bahwa infrastruktur kereta ringan biasanya dibangun di lokasi berbeda dengan infrastruktur perhubungan yang sudah ada. "Buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol?" ujar JK. JK menegaskan, inefisiensi-inefisiensi itu membuat biaya pembangunan melambung tinggi, mencapai Rp 500 miliar per kilometer.

Sementara itu, Fraksi Gerindra dan PKS DPRD DKI Jakarta telah sepakat membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki proyek LRT Jakarta. Proyek tersebut dinilai sudah bermasalah sejak awal.

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mengatakan, pada awal pembangunan proyek LRT Jakarta diwarnai sejumlah kecelakaan. Salah

satunya kejadian robohnya tiang LRT pada ruas Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, pada 21 Januari 2018. Kemudian harga proyek yang mencapai Rp 1,1 triliun per kilometer juga merupakan masalah yang dari awal menjadi sorotan. "Proyek LRT dimulai era mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)," ujar Nurdin.

Ruas LRT sepanjang 10 kilometer dari Kelapa Gading-Velodrome. Dari data yang dihimpunnya, Nurdin mengatakan, APBD yang digelontorkan sebesar Rp 1 triliun lebih untuk setiap 1 kilometer jalur LRT. Angka tersebut jauh lebih besar dibanding ruas LRT yang dibangun pemerintah pusat Bekasi-Jakarta, yakni hanya Rp 500 miliar per satu kilometer.

"Kita ini (Jakarta) membangun LRT lebih mahal dua kali lipat dibanding LRT yang sama yang dibangun pemerintah pusat. Tapi kok LRT kita terus-terusan bermasalah, berarti kan ada persoalan di situ," kata Nurdin.

Lebih lanjut Nurdin menjelaskan, peristiwa kecelakaan yang diakibatkan proyek LRT bukan kali pertama terjadi. Pada Oktober 2017, tiang bagian dari proyek konstruksi LRT menimpa rumah warga di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kemudian pada Senin 22 Januari 2018 ini kecelakaan kembali terjadi. "Tentu kami tidak ingin kecelakaan terus menerus terjadi dan membahayakan jiwa masyarakat Jakarta," terang dia.

Dijelaskan Nurdin, melalui Komisi D pihaknya berencana memanggil instansi terkait, yakni Jakarta Propertindo, dan kontraktor untuk menjelaskan persoalan ini. Jika perlu melalui pansus. "Jika perlu kami akan

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## LRT Jabodetabek Terancam Molor

meminta proyek dihentikan sementara dan dievaluasi menyeluruh dahulu sebelum dilanjutkan kembali," tegas Nurdin.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif juga menegaskan untuk segera membentuk pansus LRT. Menurutnya pansus LRT sudah seharusnya dibentuk, mengingat banyaknya persoalan yang ada. "Kaki di Fraksi Gerindra sudah setuju membentuk pansus," tegasnya.

Sayangnya, Sekretaris Perusahaan Jakarta Propertindo (Jakpro) Hani Sumarno belum berkomentar. Saat dihubungi wartawan, yang bersangkutan tidak bersedia merespons.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan pihaknya saat ini tengah menyiapkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengawasi pembangunan kereta api ringan atau light rail transit fase kedua. (wok)

Anggaran total mencapai Rp 22,8 triliun atau Rp 500 miliar per kilometer.

Dimulai sejak September 2015.

Target penyelesaian fase I Mei 2019.

Progress pembangunan proyek LRT Jabodebek fase I hingga Januari 2019 telah mencapai 56,1 persen.

Fase I membentang dari Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang kemudian Cawang-Dukuh Atas.

LRT Jabodebek sendiri tercatat sepanjang 44,3 kilometer.

Progress Cawang-Cibubur 76,21 persen.

Cawang-Kuningan-Dukuh Atas 44,19 persen.

Cawang-Bekasi Timur 106 persen.